

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Mengoptimalkan Kemampuan Pencari Kerja untuk Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

DESI DEVRIKA DEVRA

Universitas Islam Negeri Suska Riau

Jl. HR. Soebrantas Street No.Km, RW.15, Simpang Baru, Panam, Kota Pekanbaru, Riau 28293

*E-mail : desi.devrikadevra@gmail.com (korespondensi)

Abstract: The purpose of this study was to determine the role of the Department of Manpower and Transmigration of Riau Province in optimizing the ability of job seekers to create quality and competitive human resources. The results showed that the role of the Department of Manpower and Transmigration of Riau Province in optimizing the ability of job seekers to create quality and competitive human resources can be done in two ways, namely through institutional arrangement and improvement of the workforce training system. The role of the Department of Manpower and Transmigration of Riau Province in carrying out institutional arrangements can be done by: 1). Improve the management of the Riau Province Work Training Center (BLK) by handing over its management to the Central Government. 2). Improvement of domestic apprenticeship programs. 3). Preparation of workforce planning in Riau Province. Meanwhile, the role of the Manpower and Transmigration Office of Riau Province in improving the workforce training system can be done by: 1). The selection of the right training participants is carried out in a transparent manner. 2). Appointment of qualified training instructors. 3). Effective training materials. 4). Training methods that suit the needs of the business world.

Keywords: *Work Ability, Department of Manpower, Transmigration of Riau Province.*

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan nasional mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku pencapaian tujuan tersebut. Sesuai dengan peranan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan tenaga kerja yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan ketenagakerjaan. Kualitas tenaga kerja

yang rendah disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Tidak saja disebabkan banyaknya usia putus sekolah, namun juga disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan sehingga tenaga kerja tidak mampu menyerap atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diketahui angka ketenagakerjaan di Provinsi Riau mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hal itu sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Masalah yang ada pada ketenagakerjaan saat ini adalah jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan lowongan kerja yang tersedia sehingga angka pengangguran di Provinsi Riau masih cukup besar. Tingginya angka pencari kerja dan juga tingkat kompetisi pencarian kerja untuk bersaing pada setiap bidang pekerjaan yang ada mengharuskan setiap pencari kerja

memiliki kemampuan kerja yang berkualitas dan mumpuni di setiap bidangnya.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada umumnya yang menjadi fokus perhatian dibidang ketenagakerjaan adalah penduduk usia kerja yang termasuk didalamnya para pencari kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mengukur TPAK adalah dengan membandingkan penduduk usia kerja dengan angkatan kerja pada tahun yang sama. Provinsi Riau pada tahun 2012 memiliki jumlah angkatan kerja 2.506.776 meningkat menjadi 2.965.585 pada tahun 2017 atau naik rata-rata 4,57 persen setahun. Sedangkan jumlah penduduk usia kerja juga meningkat dari 3.963.872 pada tahun 2012 menjadi 4.634.041 pada tahun 2017 atau meningkat rata-rata 4,2 persen per tahun. Perkembangan TPAK Provinsi Riau selama tahun 2012 sampai dengan 2017 terlihat pada tabel berikut ini:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam tahun 2013-2017 di Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan menurun dari 64,09 persen tahun 2013 menurun sedikit menjadi 64,00 persen tahun 2017 atau menurun rata-rata (0,34) persen. Keadaan ini disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang dapat diakses di satu sisi dan di sisi yang lain terjadinya perubahan status penduduk dari angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa untuk dapat mengatasi kurangnya

keterampilan tenaga kerja Indonesia, pemerintah membuat ketentuan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tentang pelatihan kerja yang terdapat pada Bab V Pasal 9 adalah sebagai berikut "Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan". Kurangnya keterampilan tenaga kerja di Provinsi Riau sangatlah banyak, sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan, oleh karena itu salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengadakan pelatihan tenaga kerja.

Untuk mengurangi para pencari kerja yang kekurangan keterampilan, maka peran pemerintah adalah penting disini. Hal tersebut perlu mendapat perhatian dari dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau. Dalam hal ini Disnakertrans Provinsi Riau harus bisa menjalankan fungsinya sebagai instansi yang berkaitan dengan pelatihan kerja bagi setiap tenaga kerja yang ada di Provinsi Riau. Maka sebagai pemerintah harus memberikan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kerja kepada masyarakat untuk bisa di kemudian hari tidak hanya mengharapkan lapangan kerja yang tersedia tetapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing untuk mengembangkan kompetensi kerja guna mencapai produktivitas dan kesejahteraan.

Sebagaimana tertuang dalam Visi Pemerintah Provinsi Riau yaitu "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia". Dimana dalam penjabaran visi tersebut untuk menjadikan Riau yang mampu berdaya saing maka dengan menciptakan kondisi kemampuan daerah yang mapan di dukung pertumbuhan

ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan yang lestari. Sementara itu dalam rangka mendukung Visi Gubernur Riau 2019-2024 maka setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan prima dan tata kelola yang baik kepada masyarakat dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya tingkat pendidikan dan pengetahuan/keterampilan masyarakat.

Tenaga kerja dari sisi jumlah dan kualitasnya akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah termasuk pada Provinsi Riau. Jumlah tenaga kerja yang besar tanpa diikuti kualitas yang baik akan sulit bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain. Bahkan jika jumlahnya tidak terpenuhi, maka daerah harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Adanya fenomena kompetensi dan etos kerja yang masih rendah, hal ini dikarenakan adanya sifat malas dan kurangnya daya kreatifitas yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Jika banyak tenaga kerja di Provinsi Riau yang kreatif dan memiliki kualitas yang baik maka akan tercipta lapangan kerja bagi dirinya. Meskipun Provinsi Riau diakui sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi dan perkebunan sawit dimana pada sektor ini sangat banyak menyerap tenaga kerja, tetapi pada kenyataannya dengan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Provinsi Riau maka sumber daya alam yang banyak tadi bisa dikelola dengan baik.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Pembangunan industri di Provinsi Riau dilakukan untuk membuka lapangan kerja baru, memenuhi kebutuhan daerah dan untuk kegiatan ekspor. Untuk memacu pertumbuhan

industri tersebut tentu tidaklah mudah karena ini membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Untuk itu guna mengoptimalkan partisipasi angkatan kerja untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Provinsi Riau disinilah peran penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Salah satu usaha yang perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing tersebut adalah lebih meningkatkan peran dari Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau saat ini melalui pemberian pelatihan kerja yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Menurut Rivai dan Sagala (2014), pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja yang pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Program pelatihan kerja adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Provinsi Riau dalam hal angka ketenagakerjaan yang semakin bertambah setiap tahunnya. Upaya yang dimaksud berdampak langsung bagi angkatan kerja yang ada untuk memperoleh keterampilan dasar sehingga mampu membangun pribadi maupun kelompok agar secara mandiri dapat menghidupi diri sendiri maupun keluarganya atau masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Hal yang terjadi saat ini di Provinsi Riau adalah banyaknya penduduk usia kerja yang tidak semuanya memperoleh keterampilan dan keahlian tertentu dari pendidikan formal. Banyak yang ingin melanjutkan sekolah tetapi tidak dapat karena tidak memiliki biaya,

sehingga mereka pun tidak melanjutkan sekolah. Oleh karena itu penyiapan tenaga kerja yang tepat dan terarah yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sangat diperlukan mengingat tantangan dunia kerja / dunia usaha saat ini penuh persaingan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas, profesional dan mampu berdaya saing. Dimana saat ini perusahaan dalam merekrut tenaga kerjanya tidak hanya melihat ijazah pendidikan formal sebagai syarat dalam bekerja saja, akan tetapi juga keterampilan yang merupakan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan bidang kerja yang tersedia.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam mengoptimalkan kemampuan pencari kerja untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau.

HASIL

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam melakukan penataan kelembagaan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Meningkatkan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Riau dengan cara menyerahkan pengelolannya ke Pemerintah Pusat.
- b) Peningkatan program pemagangan dalam negeri.
- c) Penyusunan perencanaan tenaga kerja di Provinsi Riau.

Sedangkan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam melakukan perbaikan sistim pelatihan tenaga

kerja dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pemilihan peserta pelatihan yang tepat dilakukan secara transparan
- b) Penunjukan instruktur pelatihan yang berkualitas.
- c) Materi pelatihan yang efektif.
- d) Metode pelatihan yang sesuai kebutuhan dunia usaha.

PEMBAHASAN

Perencanaan Tenaga Kerja merupakan acuan dalam Pembangunan Ketenagakerjaan sebagaimana Undang – undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Bab IV pasal 7 dan 8, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang tata cara Memperoleh data dan Informasi Ketenagakerjaan. Atas dasar amanat Undang – Undang tersebut pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun perencanaan tenaga kerja.

Dalam proses perencanaan tenaga kerja, persediaan tenaga kerja menjadi tumpuan awal yang menentukan kuantitas dan kualitas tenaga kerja, sedangkan kebutuhan tenaga kerja adalah sesuatu yang harus direncanakan dan diciptakan. Sementara itu dengan kondisi daerah yang cenderung surplus persediaan tenaga kerja seperti di Provinsi Riau, maka penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya adalah upaya yang mutlak harus dilakukan apapun kondisi tenaga kerja yang tersedia. Demikian pula perbaikan berbagai sistem yang berkenaan dengan penanggulangan pengangguran. Konsep ini berkaitan erat dengan kondisi nyata di Provinsi Riau untuk mengatasi masalah pengangguran yang dengan jelas menunjukkan ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja.

Ketenagakerjaan selalu terkait dengan kependudukan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan (*supply*) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran

dan setengah pengangguran. Jika diteliti lebih mendalam dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi sebanyak 10,05% terjadi di Kabupaten Bengkalis dan yang terendah di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 4,08%. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi terjadi di Kabupaten Pelalawan sebesar 69,51% dan terendah di Indragiri Hilir sebesar 62,89%.

Tingkat pengangguran di Provinsi Riau juga dibagi berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan serta jenis kelamin. Diketahui bahwa pengangguran tertinggi di Kabupaten Bengkalis sebesar 13,26% pada perkotaan dan 6,85% pada perdesaan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pengangguran laki-laki tertinggi juga berada pada Kabupaten Bengkalis sebesar 10,18% sedangkan pengangguran perempuan di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 10,17%. Hal ini dipicu adanya ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja. Pemerintah Provinsi Riau berupaya mengurangi pengangguran dengan pelaksanaan berbagai pelatihan untuk menjadikan pencari kerja lebih mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat memacunya dalam memiliki usaha sendiri.

berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Riau harus mempunyai strategi yang tepat agar hal tersebut tidak menjadi sesuatu yang membahayakan justru hal ini menjadi peluang yang cukup baik. salah satu alasan kuat mengapa

Peran dan kapasitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang diberi tugas dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam usaha untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan para pencari kerja sehingga memiliki kualitas dan mampu berdaya saing dalam dunia kerja juga merupakan tugas yang harus dapat dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, maka dari itu hal yang harus dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Riau untuk dapat menciptakan tenaga kerja yang kualitas dan mampu berdaya saing adalah sebagai berikut:

Penataan Kelembagaan

Meningkatkan Pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Riau dengan menyerahkan pengelolaannya ke Pemerintah Pusat

Tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja yang terampil mendorong para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan kerja untuk menambah keterampilan mereka. Pelatihan kerja merupakan sarana penting dalam pengembangan sumber daya tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja ini diharapkan nantinya menjadi tenaga kerja yang siap pakai, dalam arti bisa langsung terjun ke lapangan kerja.

Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Provinsi Riau adalah Unit Pelatihan Teknis yang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Unit Pelatihan ini memiliki tujuan supaya terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, berkualitas, dan berdaya saing. Dengan demikian, hadirnya pelatihan tersebut sebagai peran dari pemerintah untuk menjawab tantangan yang dihadapi dimasa mendatang dan masa sekarang adalah bagaimana menciptakan, membina dan memberdayakan tenaga kerja yang begitu banyak di Provinsi Riau. Maka Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan hal tersebut.

Pelatihan kerja merupakan sarana penting dalam pengembangan sumber daya tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja ini diharapkan nantinya menjadi tenaga kerja yang siap pakai, dalam arti bisa langsung terjun ke lapangan kerja. Oleh karena itu peran Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Riau saat ini harus lebih ditingkatkan dengan cara menyerahkan pengelolaan tiga Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Provinsi Riau yang ada di

Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hulu kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Republik Indonesia. Alasan kenapa perlu diserahkan tiga BLK yang terdapat di Pekanbaru, Dumai dan Rokan Hulu, dikarenakan selama ini Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memiliki keterbatasan anggaran, peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola BLK tersebut dan jika BLK itu diserahkan pengelolannya kepada pemerintah pusat, tentu saja akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun keuntungan yang di peroleh oleh Pemerintah Provinsi Riau apabila BLK yang terdapat di Pekanbaru, Dumai dan Rokan Hulu di kelola oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Republik Indonesia maka operasional di BLK Pekanbaru, Dumai dan Rokan Hulu akan lebih maksimal lagi, baik dari segi penganggaran, kompetensi dan sertifikasinya. Sebagai gambaran jika BLK yang terdapat di Pekanbaru, Dumai dan Rokan Hulu sudah jadi UPT BLK di bawah Pusat, tentu akan ada sertifikasi dan kompetensi sehingga para tenaga kerja yang menimba ilmu dan pengalaman di BLK bisa mendapatkan kompetensi dan sekaligus sertifikat kerja dari Badan Sertifikasi Nasional. Selama ini banyak tenaga kerja yang ada di Provinsi Riau hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Provinsi Riau lebih cenderung menggunakan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi keahlian di bidangnya.

Peningkatan Program Pemagangan Dalam Negeri

Dalam amanat pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan, hal tersebut merupakan salah satu konsep peningkatan kualitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pemagangan di

perusahaan. Program pemagangan di perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Program pemagangan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Tujuan utama dilaksanakannya program pemagangan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ini yaitu untuk dapat mempromosikan formasi pembelajaran dan keterampilan, dan memfasilitasi para tenaga kerja dengan menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia kerja serta ikut membantu perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerjanya. Selain itu program ini juga dapat menjadi pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.

Sebagai gambaran selama tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah melakukan kegiatan Program pemagangan dalam negeri dengan melakukan kerjasama dengan 24 perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan 40 paket pelatihan. Pada program pemagangan dalam negeri ini terfokus kepada jurusan desain grafis, menjahit, operator komputer, perhotelan, otomotif roda empat, tour operator, public relation, akuntansi perpajakan, komputer jaringan, welder, operator prime over, perhotelan, teknik pendingin AC dan kulkas, body repair, dan teknik mekanik sepeda motor.

Program pemagangan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau merupakan salah satu komponen yang

sangat penting bagi para tenaga kerja pemula oleh karena itu program pemagangan ini harus dibentuk secara proposional dengan beranggotakan unsur-unsur pemerintah, perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan asosiasi profesi sehingga nantinya mampu melakukan identifikasi melaksanakan program pemagangan yang mampu memberikan mamnfaat kepada para tenaga kerja.

Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Riau

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau dari tahun ke tahun terus berkembang secara variatif dan silih berganti, mulai dari tenaga kerja itu sendiri hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Adanya fenomena ini menjadi tanggungjawab bersama untuk dicarikan solusinya agar permasalahan ketenagakerjaan tersebut tidak menjadi beban berkepanjangan. Sebagai langkah yang paling baik adalah dengan menentukan kebijakan terkait ketengakerjaan dengan menyusun perencanaan tenaga kerja di Provinsi Riau

Perencanaan Tenaga Kerja merupakan acuan dalam Pembangunan Ketenagakerjaan sebagaimana Undang – undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Bab IV pasal 7 dan 8, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun Tahun 2007 tentang tata cara Memperoleh data dan Informasi Ketenagakerjaan. Atas dasar amanat Undang – Undang tersebut pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun perencanaan tenaga kerja.

Dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja mengamanatkan agar dilaksanakan berbagai aspek yang berkaitan dengan Perencanaan Tenaga Kerja yang menyangkut Penyusunan, Pelaporan, monitoring dan evaluasi Pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja di Provinsi Riau. *Hal ini penting dilakukan karena selama ini* selama ini di Provinsi Riau perencanaan tenaga kerja belum tertata dengan baik, dimana persoalan yang terjadi

saat ini banyak para tenaga kerja yang ada di Provinsi Riau memiliki keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh dunia usaha hal ini terjadi karena para tenaga kerja tidak memiliki akses ke perusahaan tentang kebutuhan tenaga kerja yang mereka inginkan. Kedepannya dengan adanya perencanaan tenaga kerja di Provinsi Riau ini maka persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan yang ada di Provinsi Riau dapat terpenuhi.

Perbaikan Sistim Pelatihan Tenaga Kerja

Rekrutmen Secara Online Website (Website)

Peserta pelatihan adalah kumpulan beberapa orang yang bertujuan untuk dididik/diajarkan dalam melaksanakan suatu program. Dalam pandangan Mathis dan Jackson (2011), pelatihan merupakan proses mengajar, menginformasikan atau mendidik manusia sehingga menjadi lebih baik kualifikasinya dalam menjalankan pekerjaan. Suatu pelatihan tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada peserta yang mengikuti kegiatan atau pelatihan tersebut. Oleh karena itu peserta pelatihan merupakan unsur penting dalam melaksanakan suatu program pelatihan karena sasaran dari suatu program itu adalah orang yang melaksanakan program itu sendiri. Pihak Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Provinsi Riau dalam merekrut calon peserta pelatihan memiliki standar berdasarkan anggaran yang di terima dari APBN dan APBD sehingga menentukan jumlah dari peserta setiap tahunnya. Sasaran dari peserta pelatihan di UPT-LK Provinsi Riau haruslah masyarakat yang pengangguran dan pencari kerja bukan yang sedang belajar atau menempuh sekolah. Pihak UPT-LK Provinsi Riau juga harus memberikan beberapa persyaratan dan juga proses seleksi melalui ujian tertulis dan wawancara.

Untuk itu dalam proses rekrutmen peserta yang akan mendapatkan pelatihan di UPT-LK Provinsi Riau dilakukan secara online demi terselenggaranya transparansi dalam perekrutan peserta pelatihan. Setelah pendaftaran dilakukan secara online maka calon peserta pelatihan wajib mengikuti tes tertulis dan wawancara sebelum dinyatakan lulus untuk mengikuti pelatihan, hal ini berguna untuk melihat apakah sasaran yang ditentukan UPT-LK Provinsi Riau sudah tepat untuk mengikuti program pelatihan kerja tersebut. Peserta pelatihan yang telah mengikuti program pelatihan kerja di UPT-LK Provinsi Riau tentunya akan menghadapi dunia pekerjaan. Dengan menyelesaikan pelatihan dan memiliki keterampilan diharapkan para peserta mampu mendapat pekerjaan atau membuka usaha sendiri melalui keterampilan yang didapatkan ketika mengikuti pelatihan.

Penunjukan Instruktur Pelatihan Yang Berkualitas.

Instruktur berperan penting dalam pelaksanaan program pelatihan kerja. Berhasil atau tidaknya suatu pelatihan akan tergantung pada kemampuan instruktur dalam menyampaikan materi, baik teori maupun praktek. Instruktur yang diminta dalam pelaksanaan program pelatihan ini adalah instruktur yang handal dalam menyampaikan materi, instruktur yang mampu menjalin kerja sama dan menjaga hubungan emosional yang baik dengan peserta pelatihan sehingga pelaksanaan program pelatihan kerja berjalan dengan baik.

Instruktur pelatihan yang ditugaskan di UPT-LK Provinsi Riau adalah orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pelatihan masing-masing yang sudah dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dibantu oleh asisten instruktur yang mendapatkan pendidikan di bidangnya masing-masing terlebih dahulu sebelum mereka sah sebagai asisten instruktur. Oleh karena itu latar belakang pendidikan dan pengalaman dari

setiap instruktur sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program pelatihan kerja di UPT-LK pada berbagai jenis bidang dan jurusan yang ada. Latar belakang pendidikan sangat berpengaruh dengan bidang pelatihan masing-masing jurusan.

Setiap UPT-LK harus memiliki instruktur yang berpengalaman dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pelatihan dan di bantu oleh tenaga honor yaitu asisten pelatih yang pada awalnya diberikan pendidikan dasar dan pelatihan di CEVEST (*Centre for Vocational and Extension Service Training*) tentang bidang pelatihan dan keterampilan yang akan mereka kerjakan sebelum ditunjuk sebagai asisten instruktur yang sah. Apabila dalam pemilihan instruktur pelatihan ini dilakukan dengan baik maka akan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu berdaya saing.

Materi Pelatihan Yang Efektif

Materi pelatihan adalah hal-hal mengenai pokok permasalahan yang dipedomani sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah dalam melaksanakan suatu program. Pada pelaksanaan pelatihan pada dasarnya materi dan metode pelatihan telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah. Dalam pelaksanaan pelatihan kerja UPT-LK Provinsi Riau, materi yang diberikan dapat berupa materi teori dan praktek. Materi pelatihan ini adalah salah satu unsur penting dalam melaksanakan program pelatihan. Karena apabila tidak ada materi dari instruktur pelatihan, maka peserta pelatihan tidak akan mendapatkan keterampilan setelah melaksanakan pelatihan tersebut.

Materi pelatihan disampaikan oleh instruktur dan asisten instruktur melalui ceramah dan dialog langsung di dalam kelas atau workshop. Materi pelatihan sebelumnya telah dibentuk dalam silabus

pelatihan supaya ukuran dalam memberikan materi dapat ditentukan sesuai dengan waktu pelatihan. Materi yang berbentuk teori disampaikan oleh instruktur sendiri dan untuk materi praktek disampaikan oleh minimal dua orang yaitu instruktur dan asisten instruktur. Sebelum menyampaikan materi pelatihan, pihak dari UPT-LK Provinsi Riau membentuk silabus pelatihan yang akan menjadi standar materi kepada setiap peserta di jurusan masing-masing. Materi yang diberikan saat pelatihan yaitu teori untuk pengetahuan mendasar dan praktek untuk mengaplikasikannya.

Metode Pelatihan Yang Sesuai Kebutuhan Dunia Usaha

Metode pelatihan adalah suatu cara atau jalan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pekerjaan atau keahlian sumber daya manusia atau peserta pelatihan. Dalam pelaksanaan program pelatihan kerja di UPT-LK Provinsi Riau perlu menyusun cara atau metode dalam proses pelaksanaan pelatihan kerja. UPT-LK dapat menentukan jumlah perbandingan sesuai dengan kebijakan yang ada, seperti materi teori sebesar 30 persen dan 70 persen untuk praktek sebagai metode pelatihannya yang akan dilakukan bersama seluruh peserta pelatihan di setiap jurusan.

Pelaksanaan pelatihan kerja oleh instruktur dan asisten instruktur menggunakan metode dengan perbandingan yang telah disusun dalam kurikulum UPT-LK Provinsi Riau sendiri. Awal pelatihan digunakan untuk memberikan teori-teori dasar pelatihan lalu diikuti dengan praktek oleh setiap peserta pelatihan. Metode instruktur dalam pelatihan menggunakan satu orang instruktur saja dalam menyampaikan teori dan untuk praktek instruktur dan asisten bekerja sama dalam melakukannya. Materi praktek di berikan lebih banyak karena diharapkan peserta pelatihan setelah lulusnya siap bersaing dan bekerja dengan keterampilan yang didapatkan pada pelatihan ini.

Setiap metode yang dijalankan UPT-

LK Provinsi Riau harus sesuai dengan tujuan para peserta untuk mendapatkan keterampilan langsung dengan mempraktekkannya. Dan sebelum pelatihan selesai, para peserta pelatihan harus diberikan ujian akhir tertulis dan ujian praktek untuk mengukur seberapa kemampuan peserta selama mengikuti pelatihan.

SIMPULAN

Dalam mengoptimalkan partisipasi angkatan kerja untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah menguatkan peran kelembagaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan sumberdaya manusia di Provinsi Riau selain itu perlu ada peningkatan hubungan kerjasama yang lebih erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta dalam usaha meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di Provinsi Riau sehingga kedepannya angka pengangguran yang tinggi di Provinsi Riau dapat ditekan melalui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

DAFTAR RUJUKAN

- Mathis, Robert & H. Jackson, John. 2011. *Human Resource Management* (edisi 10). Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 *Tentang Tata Cara Memperoleh Data Dan Informasi Ketenagakerjaan*
- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*